

STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SD / MI

Aris Nurkhamidi

FTIK UIN KH. Abdurrahman Wahid

Abstrak: Penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka belajar (KMB) dimaksudkan untuk membangun postur anak didik yang memiliki bangunan intelektual, keterampilan dan kepribadian yang kokoh dan kreatif. Implementasi penguatan profil pelajar Pancasila pada pendidikan SD / MI paling kurang membutuhkan dua syarat utama. Pertama kreativitas guru dalam mendesain program pendidikan dan ke dua keterampilan guru mengembangkan teknik dan instrumen evaluasi yang tepat. Pendidik yang kreatif akan melahirkan program yang variatif dan disukai siswa, dan teknik evaluasi yang tepat akan mendorong capaian hasil belajar dari kemampuan repetitif menjadi kemampuan produktif.

Kata kunci : kreativitas, evaluasi, pendidik

PENDAHULUAN

Salah satu bidang garap pemerintah adalah membangun sumber daya manusia agar memiliki kompetensi unggul. Kompetensi unggul dalam perspektif pendidikan adalah terwujudnya individu yang memiliki kematangan pribadi, penguasaan sains dan mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi dalam kehidupan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, orientasi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas 20/2003).

Untuk mewujudkan orientasi pembangunan sumber daya manusia tersebut, salah satu instrumen yang dikembangkan adalah pendidikan. Pemerintah terus mengembangkan desain kurikulum yang diharapkan mampu memberi layanan pendidikan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah bidang pendidikan saat ini adalah mengembangkan Kurikulum Merdeka (KM). Kurikulum Merdeka ini mulai dikembangkan pada tahun 2020 dan implementasinya secara yuridis didasarkan pada Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Peraturan Menteri ini memuat struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan assesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta beban kerja guru. Selanjutnya secara teknis penerapan kurikulum didasarkan pada Surat Edaran No. 0574/H.H3/SK.02.01.2023. Mulai tahun 2023/2024 sekolah / madrasah dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan tiga pilihan ; mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.

Kurikulum Merdeka adalah kelanjutan dari kurikulum 2013, bukan dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum 2013. Aspek-aspek yang sudah ada pada kurikulum 2013 seperti pendekatan saintifik (*scientific approach*), evaluasi otentik dan penguatan 18 karakter pendidikan tetap dilanjutkan.

Di antara aspek yang fundamental dalam Kurikulum Merdeka adalah penguatan desentralisasi pendidikan dan penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan desentralisasi pendidikan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan materi dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik sekolah, lingkungan pendidikan dan kebutuhan anak didik. Penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan dengan memberikan porsi kegiatan belajar yang lebih berorientasi pembentukan karakter manusia Indonesia yang cinta negeri, produktif dan berjiwa kemanusiaan.

Filosofi dasar kurikulum merdeka adalah keleluasaan pendidik mengembangkan pembelajaran dan pembelajaran berkualitas. Filosofi ini diwujudkan dengan empat kebijakan operasional yaitu ; pengembangan *softskill* dan karakter, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (Kemdikbud ; 2022).

Kajian ini akan mengungkap kesiapan institusi pendidikan dan pendidiknya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut, apa tantangannya dan bagaimana strategi untuk mematangkan implementasi kurikulum merdeka.

Metode

Pengkajian tentang kesiapan madrasah dan pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dilakukan dengan beberapa teknik. Tahap pertama dilakukan distribusi angket kepada 25 informan terpilih, guru Madrasah Ibtidaiyah di Pekalongan, Demak, Blora, Boyolali dan Salatiga, Jawa Tengah. Untuk pendalaman (*indept interview*) dilakukan wawancara dengan sejumlah narasumber dan untuk melihat regulasi dan kebijakan implementasi kurikulum merdeka dilakukan pengkajian dokumentasi.

Wawancara dengan otoritas birokrasi pendidikan dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum kesiapan lembaga pendidikan dan kebijakan untuk implementasi kurikulum merdeka di tingkat lokal.

Observasi dilakukan dengan melihat kesiapan infrastruktur pendidikan, ketersediaan alat, media, sumber belajar atau perbukuan dan fasilitas pendukung.

Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Data yang digunakan sebagai bahan analisa adalah data yang memiliki tingkat validitas dan otentisitas baik. Data yang tidak valid dan tidak otentik, dipinggirkan agar tidak mempengaruhi analisa dan hasil. Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif analitik.

HASIL

Untuk memperoleh data tentang kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka di SD / MI, dibagikan angket kepada 25 responden dengan tiga variabel utama. 1. Bagaimana kesiapan pendidik mengimplementasikan kurikulum merdeka (2) bagaimana kesiapan infrastruktur pembelajaran dan (3) bagaimana kebijakan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka.

Pertama kesiapan pendidik

Untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dasar / madrasah ibtidaiyyah, diajukan pertanyaan tentang keikutsertaan guru dalam pendidikan dan pelatihan dan persepsi diri (guru) tentang pemahaman kurikulum merdeka belajar.

Mayoritas responden (22) menyatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti workshop atau pelatihan tentang kurikulum merdeka belajar, baik yang diselenggarakan oleh sekolah / madrasah atau institusi lain. 3 responden menyatakan sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh institusi lain, bukan oleh sekolah atau adrasah tempat mereka mengajar.

Meski responden belum pernah mengikuti workshop atau pelatihan, namun mereka merasa sudah mengerti konsep kurikulum merdeka belajar, secara terbatas. Pengetahuan tentang kurikulum merdeka mereka peroleh dengan belajar mandiri, mengakses sumber informasi dari media sosial dan perbincangan dengan teman.

Jika pada tahun ajaran 2023 / 2024 nanti kurikulum merdeka belajar diterapkan di sekolah / madrasah, dengan tingkat pemahaman yang variatif tersebut, mereka siap melaksanakannya dalam pembelajaran.

Kesiapan infrastruktur

Untuk mendapatkan data tentang kesiapan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan dalam penerapan kurikulum merdeka, diajukan beberapa pertanyaan tentang ; (1) Ketersediaan buku ajar dan sumber belajar Pustaka, ketersediaan ruang kegiatan praktikum dan kreasi siswa dan ketersediaan alat permainan edukatif .

Dari 25 responden yang memberikan informasi, diperoleh data bahwa sampai saat ini sekolah / Madrasah tempat mereka mengajar, belum memiliki sumber belajar pustaka sesuai kurikulum merdeka. Sumber pustaka yang mereka butuhkan adalah buku ajar dan buku siswa kurikulum merdeka dan suplemen kegiatannya. Bahan pustaka yang saat ini ada adalah buku pegangan guru, buku belajar siswa dan suplemen sesuai kurikulum 2013.

Ruang praktikum, ruang berkreasi, alat peraga dan area kegiatan untuk kegiatan kurikulum merdeka juga belum dimiliki. Sarana dan fasilitas belajar yang dimiliki sekolah / madrasah saat ini, masih sama dengan sarana yang dimiliki untuk kegiatan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Belum ada penambahan atau pengadaan fasilitas dan sarana pembelajaran baru, sebagai kesiapan implementasi kurikulum merdeka.

Kebijakan sekolah / Madrasah

Unsur yang dikaji selanjutnya adalah tentang kebijakan sekolah / madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk mendapatkan data tentang kesiapan sekolah / madrasah dalam menerapkan kurikulum merdeka, diajukan pertanyaan sebagai berikut ; (1) apakah sekolah / madrasah pernah melakukan *inhouse training* tentang kurikulum merdeka ?. (2) apakah sekolah / madrasah sudah pernah melakukan bedah kurikulum dan pengembangan kurikulum secara mandiri ? . (3) apakah sekolah / madrasah sudah merancang model kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila ?.

Jawaban yang diperoleh dari responden, diketahui bahwa sampai saat ini sekolah / madrasah belum pernah melakukan kegiatan penguatan kapasitas bagi guru atau pendidiknya, baik dalam bentuk *inhouse training*, diskusi, simulasi atau bentuk lainnya. Ada beberapa guru yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum merdeka, namun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh instansi pemerintah bukan oleh sekolah / madrasah.

Sekolah juga belum mengambil kebijakan khusus untuk peningkatan kapasitas guru dalam memahami dan mengoperasikan kurikulum merdeka.

Responden juga menyampaikan bahwa sekolah / madrasah tempat mereka mengajar belum pernah melakukan bedah kurikulum dan mendesain kurikulum sesuai karakteristik kurikulum merdeka. Menurut responden, biasanya menjelang pelaksanaan kurikulum diadakan sosialisasi oleh institusi birokrasi pendidikan setempat. Sarana pembelajaran berupa bahan pustaka, biasanya ada koordinasi dengan beberapa kelompok kerja sekolah / madrasah atau bahkan dikordinir oleh Dinas Pendidikan / Kementerian setempat. Saat ini sekolah / madrasah sedang dalam menunggu kebijakan teknis tersebut. Responden juga menyatakan bahwa sampai saat ini madrasah belum merancang kegiatan untuk penguatan profil pelajar Pancasila.

PEMBAHASAN

Untuk mengkaji implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar / madrasah Ibtidaiyyah dan menyiapkan strateginya, dilakukan dengan pendekatan teori pengembangan kurikulum.

Dalam perspektif teori kurikulum, pengembangan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum tidak boleh statis atau konservatif tetapi perlu terus dikembangkan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Masing-masing adalah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kebutuhan anak didik, kebutuhan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah (Sudjiarto; 2008). Susiana, dkk (2006) mengemukakan landasan pengembangan kurikulum terdiri dari aspek filosofi, psikologis, sosiologis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurikulum perlu disegarkan sesuai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi sesuai dengan fokus pendidikan yang dikembangkan suatu lembaga. Lembaga yang berfokus pada pendidikan ekonomi, politik, hukum, budaya, pertanian dan sebagainya memperhatikan kemajuan ilmu dan pengetahuan untuk diadaptasi dalam pembelajarannya. Pada pendidikan dasar anak didik berada pada fase generalis, yaitu meletakkan dasar-dasar keilmuan, kecerdasan, akhlak dan kepribadian untuk menyiapkan pendidikan tingkat lanjut (Muhammad Ali : 2009).

Penyesuaian dan pengembangan kurikulum berbasis ilmu pengetahuan, terus dilakukan karena sesuai dengan sifatnya, sains selalu berkembang. Demikian juga teknologi dan produk teknologi selalu berkembang seiring berkembangnya riset dan pengembangan (RnD).

Pengembangan kurikulum berbasis pengetahuan dimaksudkan agar anak didik mempelajari ilmu dan pengetahuan terkini (mutahir) dan bukan ilmu atau pengetahuan yang sudah tidak lagi aktual dan tidak sesuai kebutuhan. Sedang pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dimaksudkan agar anak didik mampu menguasai sains teknologi atau paling tidak mampu menggunakan produk teknologi terbaru (Nurkholis : 2013).

Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada aspek sosiologi. Pada aspek ini, kurikulum perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Kebutuhan masyarakat, orientasi masyarakat dan problem yang dihadapi masyarakat, menjadi sumber kajian pengembangan kurikulum sekaligus orientasi pendidikan. Pada saat masyarakat hidup di era industri, kebutuhan masyarakat adalah penguasaan teknologi dan mesin-mesin produksi. Pada masa ini, kurikulum pendidikan dikembangkan dengan orientasi penguasaan teknologi, agar meningkatkan keterampilan, produktifitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraannya.

Problematika masyarakat yang muncul di era industri, antara lain mekanisasi kerja otot secara massif yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, pencemaran, meningkatnya kriminalitas, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak seimbang, kompetisi tidak sehat dan sebagainya (Yunia Rahayuningsih : 2017). Orientasi pengembangan kurikulum pada era ini adalah, memberikan bangunan sosiologis yang kuat agar masyarakat tidak mengalami keterkejutan budaya di era industri dan mampu hidup dan berkembang di era industri dengan baik.

Saat ini masyarakat Indonesia berada dalam peradaban baru dunia, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan era sebelumnya. Masyarakat Indonesia memasuki era kehidupan global yang ditandai dengan arus teknologi dan budaya baru. Era yang ditandai meningkatnya produktifitas, efisiensi, sekaligus kompetisi dan tatacara hidup baru.

Pada era ini orientasi penguasaan teknologi beralih dari teknologi mesin industri ke teknologi data dan digital. Pengembangan kurikulum teknologi ini menjadi salah satu fokus dunia pendidikan, agar layanan pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era ini. Selain penguasaan teknologi dalam arti alat, orientasi pendidikan juga dikembangkan ke arah kemampuan kerja dan berfikir kritis analitik, keterampilan *computational thinking* dikembangkan, agar anak didik memiliki keterampilan menyelesaikan masalah dengan pendekatan rasional (Sanjaya : 2009).

Anak didik, masyarakat dan dunia kerja adalah pemakai produk pendidikan. Sedang pemerintah, birokrasi pendidikan dan pendidik menjalankan fungsi sebagai pelayan pendidikan. Relasi antara pemerintah dengan masyarakat, diwujudkan secara langsung dalam relasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Pengembangan kurikulum menjadi kebutuhan anak didik dan masyarakat. Pemerintah, birokrasi pendidikan di bawahnya, menjadi organisator pengembangan pengembangan kurikulum. Guru berada pada posisi yang strategis, yaitu menjadi bagian dari organisasi pengembangan kurikulum sekaligus sebagai eksekutor pelaksanaan kurikulum (Hamalik :2017).

Guru sebagai organisator menjalankan fungsi mendesain materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. Ada 5 komponen yang menjadi domain guru dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum, yaitu mengembangkan bahan ajar, sumber belajar, menyiapkan media yang menarik dan efektif, mengembangkan strategi pembelajaran yang aktif dan melakukan evaluasi dengan teknik yang tepat.

Dari 5 komponen kurikulum di atas, masalah prinsipil yang sering terjadi adalah kegagalan mendesain materi pembelajaran yang kreatif dan pelaksanaan evaluasi yang kurang tepat. Pada umumnya orientasi pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengajarkan materi

yang ada dalam buku ajar dan kurang berani melakukan pengayaan atau perluasan materi pembelajaran. Alasan guru tidak berani mengembangkan materi ajar adalah kekhawatiran jika dalam kegiatan evaluasi atau ujian, soal evaluasi didasarkan pada materi ajar yang sudah dibakukan oleh Dinas Pendidikan atau intitusi lain. Guru merasa materi ajar yang dikembangkan di kelas dengan sumber belajar tambahan, seringkali tidak menjadi tagihan dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak ikutan dari sistem evaluasi ini adalah menurunnya capaian hasil belajar siswa.

Karena kekhawatiran ini, dalam proses pembelajaran guru lebih sering berfokus pada menyampaikan materi ajar sesuai dengan panduan kurikulum dan sumber belajar yang sudah ditentukan, dan kurang berani melakukan pengembangan materi ajar atau pengayaan. Pembelajaran juga lebih sering difokuskan pada persiapan mengerjakan soal-soal evaluasi, bukan mengembangkan potensi individual dan berkreasi.

Dalam kurikulum merdeka, lembaga pendidikan diberi kewenangan untuk mengembangkan materi dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan anak didik dan karakteristik sekolah. Pemerintah tidak lagi melakukan sentralisasi pendidikan, dengan menyeragamkan materi ajar, bahan ajar, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pemerintah memberikan kewenangan sekolah untuk mengembangkan materi dan kegiatan belajar. Pemerintah hanya menyiapkan tema dan alokasi waktunya. Substansi materi, bahan ajar, strategi, media dan evaluasi pembelajaran, menjadi domain sekolah dan guru (Badan standar kurikulum : 2022).

Strategi implementasi kurikulum

Kurikulum merdeka menyiapkan tujuh tema kegiatan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Tema-tema tersebut adalah ; gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhnneka tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi serta kewirausahaan (Badan standar Kurikulum : 2022). Materi kegiatan, strategi, aktivitas pembelajaran dan pola kegiatan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, karakteristik siswa dan lingkungannya.

Kurikulum merdeka mengalokasikan waktu kegiatan untuk penguatan profil pelajar Pancasila sebagai berikut :

Kelas	Alokasi Waktu
1 – V	252 jam pelajaran / tahun
VI	224 jam pelajaran / tahun

Untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, paling tidak perlu dilakukan dua hal strategis. Pertama keberanian dan kesungguhan institusi pendidikan dan pendidiknya untuk melakukan pengembangan kurikulum. Ke dua, kreativitas guru untuk mengembangkan teknik dan model evaluasi pembelajaran.

Untuk mendesain kegiatan sekolah dan pendidik dapat melakukan dengan banyak cara. Pertama melakukan diskusi antar guru untuk merumuskan kegiatan yang cocok bagi siswanya. Cara ini perlu terus dikembangkan, karena gurulah yang lebih mengerti tentang karakteristik anak didik dan lingkungannya.

Cara ke dua yang bisa dilakukan adalah melakukan diskusi antar gugus sekolah untuk mendesain kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Cara ke dua membantu bagi sekolah yang belum memiliki cukup pengalaman dalam merancang kegiatan. Cara ini juga lebih memperkaya informasi, wawasan dan kerjasama antar sekolah. Jika dianggap perlu, otoritas birokrasi pendidikan setempat dapat mengatur gugus sekolah atau kemitraan antar sekolah / madrasah.

Cara ke tiga yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan komite sekolah atau bahkan komite pendidikan. Sekolah dapat mengundang orang tua sebagai guru tamu, atau mengajak siswa melakukan kegiatan di luar sekolah dengan mentor orang tua siswa atau juga komite. Kerjasama antara sekolah dengan komite ini penting dan secara konstitusional menjadi bagian dari sistem kemitraan yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan (UU 20/2003 pasal 54 ayat 1-2).

Fungsi-fungsi komite sekolah, terutama fungsi memberi bantuan dan dukungan, perlu dipahami bukan hanya dalam konteks finansial, tetapi juga ide dan substansi pendidikan (Sri Renani : 2008).

Berikut ini contoh kegiatan yang dapat dikembangkan ;

No	Tema Kegiatan	Contoh kegiatan
1	Gaya Hidup Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengelola sampah menjadi pupuk• Membuat taman hidroponik• Melaksanakan pembelajaran out door, dll.
2	Kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none">• Menari dan menyayikan lagu daerah Festival budaya• Story telling keunikan daerah• memperkenalkan profesi dan tradisi daerah, dll
3	Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none">• Hidup rukun dengan tetangga• Kerja bhakti lintas komunitas• Merayakan budaya daerah, dll
4	Bangunlah jiwa dan raganya	<ul style="list-style-type: none">• Membiasakan perilaku hidup sehat Membudayakan bertegur sapa• Kegiatan kesehatan mental, dll
5	Suara Demokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Memilih pengurus OSIS / kelas• menyusun struktur organisasi• membagi tugas kelompok, dll
6	Rekayasa dan teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Membuat aneka mainan• Cooking class• Membuat hiasan, dll

		<ul style="list-style-type: none">• Membuat rangkain elektronik sederhana, dll
7	Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat dan memasarkan produk kreatif• Market day• Unjuk karya kreatif, dll

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini adalah membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak usia SD / MI.

Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, guru juga perlu mengembangkan teknik dan model evaluasi pembelajaran yang tepat. Evaluasi pembelajaran pada kurikulum merdeka, dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang profil siswa yang memiliki kompetensi yang unggul, kepribadian yang baik dan memiliki sikap kebangsaan yang kuat.

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran capaian hasil belajar afektif berupa sikap sosial, sikap mental diri yang produktif dan juga aspek psikomotorik, penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan berkreasi atau produktif. Pengukuran dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran atau citra hasil belajar ini kurang tepat jika dilakukan dengan model evaluasi kognitif.

Evaluasi yang perlu dikembangkan dalam kurikulum merdeka belajar adalah teknik evaluasi non tes, seperti proyek, observasi, penilaian sejawat, portofolio, unjuk karya, demonstrasi, festival produk kreatif, dan produk-produk yang berorientasi memenuhi kebutuhan publik dan menyelesaikan masalah, sesuai tingkatan siswa SD / MI. Teknik evaluasi tersebut lebih sesuai untuk menilai hasil belajar yang bersifat proyek atau produk. Guru harus terampil mengembangkan teknik dan instrumen evaluasi, agar dapat memperoleh hasil belajar yang tepat dan valid (Arifin : 2009).

SIMPULAN

Sampai saat ini tingkat kesiapan satuan pendidikan SD / MI di beberapa kota untuk menerapkan kurikulum merdeka bervariasi. Ada sebagian sudah siap mengimplementasikan kurikulum merdeka namun sebagian besar belum siap.

Sebagian besar pendidik Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyyah belum memperoleh penguatan pengetahuan yang mencukupi tentang kurikulum merdeka. Sarana pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum merdeka juga masih terbatas.

Untuk memantapkan implementasi kurikulum merdeka dibutuhkan penguatan kapasitas pendidik, penyediaan fasilitas pembelajaran dan kebijakan lokal tentang pengembangan kurikulum. Pendidik perlu lebih terampil mendesain kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila secara kreatif dan mengembangkan teknik evaluasi berbasis proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 33.
- Arifin, Zaenal *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hal 14.

Hamalik, O. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017, hal. 56.

<https://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/article/view/2/2>, h.22

<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/>

<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Penguatan-Projek-Profil-Pancasila.pdf>

Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*,
<https://media.neliti.com/media/publications/104343-ID-none.pdf>

Panjastuti, Sri R, dkk, *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008, hal. 81.

Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta, Kencana, 2009, hal. 34.

Sudjiarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008, hal. 79.

Susilana, Rudi (Koord) *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: FIP UPI Bandung, 2006, hal, 43.
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional